e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828
Volume 4 No. 1 Januari - Juni 2021

JOURNAL IDEA OF HISTORY



Jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo
Kendari

JOURNAL IDEA OF HISTORY Volume 4 No. 1 Januari - Juni 2021

Journal Idea Of History

Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Budaya UHO
Ketua Jurusan Ilmu Sejarah

Editor-In-Chief
Dr. La Ode Ali Basri, S.Pd., M.Si.

Editor
Dra. Aswati M., M.Hum. (Univ. Halu Oleo)
Fatma, S.Pd., M.A. (Univ. Halu Oleo)
Faika Burhan, S.S., M.A. (Univ. Halu Oleo)
Raemon, S.Sos., M.A. (Univ. Halu Oleo)
Sarman, S.Pd., M.Pd. (Univ. Halu Oleo)
Hisna, S.Pd., M.Hum. (Univ. Halu Oleo)
Hasni Hasan, S.Pd., M.Si. (Univ. Halu Oleo)
Suharni Suddin, S.Pd., M.Pd. (Univ. Halu Oleo)
Khabiirun, S.Sos., M.Sos. (Univ. Halu Oleo)
Salebaran, S.Hum., M.A. ((Univ. Halu Oleo)
Nur Ihsan D., S.S., M.Hum. (Univ. Hasanuddin)
Mohammad Sairi, S.Pd., M.A. (Univ. Datokarama Palu)

Reviewer
Dr. Basrin Melamba, S.Pd., M.A. (Univ. Halu Oleo)
Dr. Aslim, S.S., M.Hum. (Univ. Halu Oleo)
Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. (IHDN Denpasar)
Dr. La Ode Rabani, M.Hum. (Univ. Airlangga)
Haliadi Sadi, S.S., M.Hum., PhD. (Univ. Tadulako)
Hendra, M.Phil., M.A. (Univ. Tadulako)
Dr. Ilham Daeng Makkelo, M.Hum. (Univ. Hasanuddin)
Asyhadi Mufsi Sadzali, S.S., M.A. (Univ. Jambi)
Dr. Nina Witasari, M.Hum. (Univ. Negeri Semarang)
Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhasi, S.S., M.A., M.M. (Univ. Gadjah Mada)

Desain Grafis:
Masrin, S.IP., M.A.P. (Univ. Halu Oleo)

Alamat Redaksi
Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo
JL. H.E.A Mokodompit Kendari

DAFTAR ISI

Kadie Lapandewa sebagai Matana Sorumba Kesultanan Buton pada Masa Pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanuddin: 1610-1631 1-11
La Halimuna
La Ode Ali Basri
Hayari

Sejarah Pemerintahan Onderdistrik Pondidaha: 1939-1964 12-24
Leni Suciati
Basrin
Melamba
Fatma

Perjuangan La Ode Ngkadiri di Kerajaan Muna dalam Melawan Belanda : 1626-1667 25-34
Wa Sema
Aswati M.
Hamuni

Perlawanan Rakyat Moronene Taubonto terhadap Imperialisme Belanda: 1911-1941 35-45
Muhammad Rahdan
Ali Hadara
Aslim

Peranan Zending bagi Kehidupan Masyarakat Tolaki di Poli-Polia Kolaka Bagian Timur: 1918-1942 46-56
Ferdinand Sandu
Syahrun
Hisna

Dinamika Desa Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Periode 1966-1983. 57-64
Jumiati
Khabiirun
Evang Asmawati

Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Muna pada Masa Pendudukan Jepang: 1942-1945 65-74
Wa Santi
Sarman
Faika Burhan
Sitti Hermina

Biografi Seni Ni Ketut Arini, Seorang Penari dan Guru Tari Bali 1943–2020 : Pendekatan Struktural Fungsional 75-90
Dwi Ari Wulaningsih

Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Distrik Rumbia pada Masa Pemerintahan Mokole I Pimpie:……...……. 91-101
Karmianti
Suharni Suddin
Elmy Selfiana Malik

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

SEJARAH PEMERINTAHAN *ONDERDISTRIK* PONDIDAHA: 1939-1964

Oleh:
Leni Suciati
Basrin Melamba
Fatma
(Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo)

Abstact

The objectives of this research are: (1) to define the early formation of Pondidaha onder-district; (2) to investigate the development of Pondidaha onder-district government; (3) to expose the policies were implemented by the head of Pondidaha District. The method used in this research was historical method consisting of five steps such as: topic selection, source heuristics, verification, source interpretation by analysis and synthesis, and historiography. The result of this research revealed that: (1) Pondidaha onder-district was formed as a result of the conquest of Konawe by the Dutch in 1911 so that the government in Konawe was taken over by the Dutch. The Dutch then formed a puppet kingdom called La Iwoi. The Netherlands also divided the territory and shaped districts and onder-districts. In 1939, onder-district of pondidaha was formed which a part of Wawotobi district. (2) In the development of Pondidaha government, there were three eras or periods, namely the Dutch era, the Japanese era and the beginning of the independence. (3) During their tenure as district chief in Pondidaha, Turaako, Labulua, and Bokori had policies which implemented in their respective areas including the division of territory in Pondidaha area.

Keywords: Government, Onderdistrik, Pondidaha.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan latar belakang terbentuknya *Onderdistrik* Pondidaha, (2) Mengetahui perkembangan pemerintahan *Onderdistrik* Pondidaha, (3) Mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang diterapkan oleh kepala Distrik Pondidaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan penelitian, yaitu: 1) Pemilihan topik, 2) Heuristik Sumber, 3) Verifikasi sumber, 4) Interpretasi sumber yang dilakukan dengan cara analisis dan sintesis, 5) Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Onderdistrik Pondidaha terbentuk akibat ditaklukkannya Konawe oleh Belanda pada tahun 1911 sehingga kondisi pemerintahan di Konawe diambil alih oleh Belanda. Belanda kemudian membentuk sebuah kerajaan boneka yang bernama La Iwoi. Belanda juga membagi wilayah serta membentuk distrik dan onderdistrik. Pada tahun 1939 terbentuklah Onderdistrik Pondidaha yang merupakan bagian dari wilayah Distrik Wawotobi. (2) Pada perkembangan pemerintahan Pondidaha terdapat tiga zaman atau masa yakni zaman Belanda, zaman Jepang dan awal kemerdekaan. (3) Selama menjabat menjadi kepala Distrik di Pondidaha, Turaako, Labulua, dan Bokori memiliki kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam wilayahnya di antaranya yakni pembagian wilayah untuk daerah Pondidaha.

Kata Kunci: Pemerintahan, Onderdistrik, Pondidaha

1. PENDAHULUAN

Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang sarat akan nilai sejarah yang kental, apalagi daerah dengan julukan Bumi Anoa ini pernah terjajah oleh Hindia Belanda seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Konawe misalnya, pengaruh Hindia Belanda berdampak terhadap semua hal termasuk dalam hal pemerintahan. Salah satu pengaruh Belanda dalam bidang pemerintahan yaitu berhasil mengubah nama tingkat wilayah di Konawe seperti Onderdistrik hingga Distrik.

Kabupaten Konawe sekarang (awal terbentuknya bernama Kabupaten Kendari) memiliki sejarah peradaban yang cukup panjang. Pemerintah Kabupaten Konawe sekarang merupakan kontinuitas dari masa lalu, wilayahnya meliputi bekas Kerajaan Konawe. Masyarakat di wilayah ini menghuni daratan jazirah Sulawesi bagian tenggara dan umumnya berasal dari etnik Tolaki.

Kehidupan masyarakat kuno etnik Tolaki telah mengalami perkembangan dan perubahan. Pada awalnya mereka hidup secara berkelompok dalam jumlah terbatas, kemudian berkembang. Mereka membentuk klen dalam bentuk *o'napo* yang hidup di wilayah *anggalo* atau lembah yang dipimpin oleh seorang *To'ono motuo* yaitu orang yang dituakan, seorang pemimpin yang dipercaya dapat melindungi kelompoknya. Tatanan sosial dan politik perlahan terbentuk dalam unit-unit kesatuan tempat tinggal atau lingkungan sosial yang disebut *o'napo.* Pemimpin yang disebut *to'ono motuo* dibantu oleh beberapa perangkat dalam rangka membina tatanan kehidupan bermasyarakat (Melamba, 2013: 83).

Bermula dari pemukiman *anggalo* atau lembah, kemudian *o'napo* berkembang dengan bentuk pemukiman yang lebih luas seiring dengan pertambahan penduduk, yaitu pemukiman yang disebut *tobu* yang dikepalai oleh *Pu'utobu.* Wilayah *tobu* ini merupakan golongan dari beberapa *o'napo.* Pada tingkat *tobu* dipimpin oleh *pu'utobu,* seperti halnya *to'ono motuo,* ia juga dibantu oleh beberapa aparat. Keadaan ini berlangsung sejak ratusan tahun. Wilayah *tobu* terbentuk dengan kesatuan yang lebih besar yaitu wilayah *wonua* (negeri) yang dipimpin oleh *mokole.* Di wilayah ini terbentuk beberapa wilayah *kemokolean* (Melamba, 2013: 83).

Telah ada beberapa kerajaan kecil yang terbentuk sebelum Kerajaan Konawe berdiri yaitu: Padangguni yang berkedudukan di Abuki pada saat itu dan rajanya bernama *Mokole* Bunduwula, Kerajaan Besulutu di Besulutu dengan rajanya yang bernama Mombeeti, kerajaan Wawolesea di Toreo dengan rajanya Wasangga. Ditambah dengan kerajaan Watumendonga di bagian timur Konawe dan Tambosupa yang bergabung dalam satu konfederasi yaitu ke Kerajaan Konawe (Melamba, 2013: 83).

Dinamika perubahan struktur pemerintahan rupanya juga terjadi di Sulawesi Tenggara. Persepsi umum selama ini menganggap kecamatan sebagai struktur masyarakat asli Konawe yang tetap bertahan dari zaman dahulu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan sejarah. Sejauh catatan sejarah yang ditemukan, bentuk masyarakat kecamatan tertua di Kerajaan Konawe (abad XIII) tidak mengenal adanya kepala kecamatan yang ada hanya wilayah *Tobu* yang dipimpin oleh seorang *Pu'utobu.* Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan waktu itu disebut *Tobu* (Melamba, 2011: 67).

Kerajaan Konawe terbentuk setelah kerajaan-kerajaan kecil bergabung menjadi satu konfederasi. Masyarakat terdahulu di daerah Konawe hanya mengenal sistem pemerintahan yang disebut *Pu'utobu.* Mereka mempercayakan keselamatan dan keamanan mereka kepada orang yang dituakan. Masing-masing kelompok memiliki kepala suku yang bertugas untuk bertanggung jawab atas kelompoknya.

Tahun 1906 Belanda mendaratkan pasukan istimewa yaitu Marsose di daerah Konawe dan mendapat perlawanan dari rakyat di Kerajaan Konawe. Namun karena persenjataan yang tidak seimbang akhirnya Kerajaan Konawe ditaklukkan oleh Belanda. Belanda kemudian berkuasa atas pemerintahan Kerajaan Konawe.

Sumber lisan yang diperoleh dari narasumber menunjukkan bahwa sebelumnya nama onderdistrik Pondidaha adalah Wutatepiha. Masyarakat percaya bahwa Wutatepiha adalah bentuk

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

kekecewaan dari nenek moyang mereka. Berdasarkan cerita dari narasumber, Wutatepiha adalah sebuah istilah ketika Saranani marah besar dan kecewa kepada para pejabat-pejabat karena sudah tidak ada lagi yang bersedia menjadi raja. Saranani kemudian dengan kerasnya memukul tanah sembari berkata "Sudahlah jika tidak ada yang mau menjadi raja maka berakhir Kerajaan Konawe". Saat itu seluruh masyarakat menyaksikan peristiwa tersebut dan kemudian memaknai pemukulan tanah oleh Saranani menjadi Wutatepiha (tanah yang pecah) (Wawancara dengan Ginal Sambari, di Pondidaha 27 November 2020).

Wutatepiha kemudian telah berganti menjadi Pondidaha. Dalam sebuah cerita rakyat dikisahkan awal mula nama Pondidaha. Berdasarkan cerita rakyat, konon pada dahulu kala Latalambe sedang melakukan penelusuran wilayah, kemudian beliau menuju Timur dan berjalan hingga sampai di Desa Hongoa. Latalambe kemudian memanggil dua orang wanita, satu wanita dalam keadaan hamil dan satunya tidak. Jika wanita hamil meninggal maka mereka akan melanjutkan perjalanan, namun jika sebaliknya maka mereka harus menetap. Kemudian kedua wanita tersebut *dihongo* (celup) ke dalam air, tak berapa lama berselang wanita yang hamil meninggal maka rombongan dan Latalambe melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di Pondidaha dan melihat ada seekor kerbau, lalu mereka mengikatnya. Latalambe kemudian menebas (Pondida'a) dan berkata "Jika kerbau menghadap ke timur maka rombongan akan tetap jalan tetapi jika melintang maka rombongan harus berhenti di sini". Namun setelah ditebas (Pondida'a) kerbau tersebut melintang, di situlah mereka menetap dan menyebut wilayah tersebut dengan nama Pondidaha (Wawancara dengan Ginal Sambari, di Pondidaha 27 November 2020).

Tahun 1911 Konawe takluk terhadap Belanda, yang kemudian disusul oleh pembentukan Distrik dan Onderdistrik di wilayah Konawe. Dengan persetujuan dari pemerintah dan pihak Belanda, Pondidaha berdiri sebagai pusat pemerintahan Onderdistrik (setingkat dengan kecamatan). Awalnya Pondidaha merupakan Onderdistrik dari Distrik Wawotobi, lalu pada tahun 1939 Onderdistrik berubah menjadi Distrik Pondidaha, dan berdiri sendiri dengan kepala distrik pertama yakni Tanggapili. Masa jabatan Tanggapili yakni dari tahun 1939 hingga 1944. Kemudian diadakan pemilihan kepala Distrik yang kedua. Turaako terpilih menjadi kepala distrik dan menjabat dari tahun 1944 sampai 1954. Kepala distrik selanjutnya dijabat oleh Labulua 1954-1955. Kepala Distrik terakhir tiba pada masa pemerintah Bokori yang berlangsung dari tahun 1955-1964.

Batasan temporal penelitian ini ialah pada tahun 1939-1964. Tahun 1939 merupakan awal dibentuknya Onderdistrik yang berasal dari pecahan Distrik Wawotobi, yang kemudian diadakan pembagian distrik pada setiap wilayah. Tahun 1964 merupakan akhir dari pemerintahan Distrik Pondidaha. Batasan Spasial penelitian ini adalah berfokus pada daerah Pondidaha Kabupaten Konawe. Persoalan pokok penelitian ini adalah tentang sejarah pemukiman onderdistrik. Untuk memperjelas pokok permasalahan penelitian ini mengkaji beberapa sub tema di antaranya: Latar belakang terbentuknya Distrik Pondidaha :1939-1964; Perubahan pemerintahan di Pondidaha: 1939-1964; dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh kepala Distrik Pondidaha :1939-1964.

Terkait kerangka konseptual, penelitian ini menggunakan konsep pemerintahan distrik. Secara etimologi pemerintahan yang berasal dari kata dasar pemerintah mempunyai arti menyeluruh melakukan sesuatu kekuasaan atau negara. Pemerintah adalah organ yang mana diletakkannya hak untuk melaksanakan kekuasaan yang berdaulat tertinggi. Secara singkat pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif (Pamudji, 1985:4).

Penelitian ini juga dilihat dari konsep perubahan masyarakat. Suatu perubahan masyarakat merupakan kenyataan yang dibuktikan oleh gejala-gejala seperti: dipersonalisasi, adanya frustasi dan apati (kelumpuhan mental), pertentangan dan perbedaan pendapat mengenai norma-norma susila yang sebelumnya dianggap mutlak, adanya pendapat *generation gap* (jurang pengertian antargenerasi dan lain-lain). Banyak penyebab perubahan masyarakat, antara lain: ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi serta penggunaannya oleh masyarakat, komunikasi transportasi,

urbanisasi, perubahan/peningkatan harapan dan tuntunan manusia (*rising demands*); semua ini memengaruhi dan mempunyai akibat terhadap masyarakat yaitu perubahan masyarakat melalui kejutan dan karenanya terjadilah perubahan yang disebut *rapid social change* (Susanto, 1983: 157)

Perubahan masyarakat tidak berdiri sendiri, demikian juga dengan masyarakat yang berada di Pondidaha. Perubahan masyarakat Pondidaha mempunyai wilayah inti (k*ernland*) dan wilayah tepi (*randland).* Wilayah inti ialah wilayah yang merupakan sumber penyebab perubahan masyarakat, sedangkan wilayah tepi ialah wilayah yang mengalami perubahan secara merembes dari wilayah inti ke wilayahnya masing-masing. Distrik Pondidaha mengalami perubahan yang cukup baik untuk setiap tahapnya, dari ekonomi, sosial dan politik.

Penelitian ini dikaji menggunakan teori perubahan sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat. Perubahan tersebut memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakukan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial juga terjadi dalam sistem sosial. Lebih tepatnya, ada perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berlainan.

Terdapat tiga konsep dalam perubahan sosial, yang pertama, studi mengenai perbedaan. Kedua, studi harus dilakukan pada waktu yang berbeda. Dan yang ketiga, pengamatan pada sistem sosial yang sama. Itu berarti untuk melakukan studi tentang perubahan sosial maka perbedaan atau perubahan kondisi objek yang menjadi fokus studi. Perubahan tersebut juga harus dilihat dalam konteks waktu yang berbeda sehingga diperlukan studi komparatif dalam dimensi waktu yang berbeda. Selain itu, objek yang menjadi fokus studi komparasi harus merupakan objek yang sama. Jadi perubahan sosial mengandung unsur dimensi ruang dan waktu (Yunita, 2013: 29-30).

Sejarah sosial juga memiliki titik fokus pada perkembangan dan perubahan yang terjadi pada suatu spasial atau wilayah tertentu yang berskala kecil ataupun luas. Sejarah sosial juga membahas beberapa aspek seperti kualitas manusia, tingkat kehidupan, turun naiknya suatu budaya dan perihal yang lainnya tergantung karakteristik wilayahnya. Penulisan sejarah tentang sosialitas mulai menjadi kajian utama dalam penulisan historiografi di Indonesia. Keadaan kompleks yang bersifat berubah dan menuju sebuah arah yang baru dan berbeda menjadi alasan dalam penulisan sejarah sosial tertentu (Kuntowijoyo, 2003: 39).

Perubahan sosial ini adalah sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana sistem pemerintahan, toleransi masyarakat, asimilasi dan akulturasi budaya (jika terjadi), dan awal mula terbentuknya suatu komunitas masyarakat yang cukup besar dari beberapa etnis yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya di Distrik Pondidaha. Seperti halnya Kecamatan Pondidaha, berawal dari nama Wutatepiha yang terdiri dari beberapa wilayah kecil hingga menjadi Kecamatan Pondidaha dan memiliki wilayah yang cukup luas. Pemukiman yang dulunya tidak teratur dan memiliki penduduk yang jumlahnya tidak terlalu banyak kini menjadi daerah yang maju dan memiliki berbagai macam mata pencaharian di antaranya bertani, berternak, dan menanam berbagai tanaman palawija yang dapat menghasilkan bagi keluarga mereka.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai 21 Agustus 2020. Tempat penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana wilayah ini dulu adalah wilayah distrik yang kini menjadi sebuah kecamatan yang memiliki wilayah cukup luas. Selain di Kecamatan Pondidaha, penelusuran sumber juga dilakukan di Perpustakaan Unaaha, Perpustakaan dan Arsip Daerah Sulawesi Tenggara dan Perpustakaan Universitas Halu Oleo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah politik yang membahas mengenai pemerintahan yang ada di zaman Onderdistrik Pondidaha. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dan

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

multidimensional. Pendekatan multidimensional adalah sebuah pendekatan untuk menjelaskan permasalahan penelitian dengan berbagai aspek atau dimensi misalnya, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi politik dan dimensi keamanan (Kartodirdjo, 2019 : 187-188).

Kategori sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Tertulis
   Sumber kepustakaan, yaitu mengkaji sumber tertulis seperti, buku, skripsi, jurnal yang relevan serta mendukung untuk mendapatkan data dalam penelitian ini seperti buku Sejarah dan Budaya Masyarakat Tolaki di Konawe.
2. Sumber Lisan
   Sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat yang mengetahui tentang masalah dalam penelitian ini. Sumber lisan pada penelitian ini yaitu dari wawancara yang diperoleh dari lima orang informan yaitu: Bisman Saranani (tokoh adat), Ajemain (tokoh adat), Ginal Sambari (anggota dewan), Hartawan Konggoasa (pensiun) dan Nana Miharja (masyarakat).
3. Sumber Artefak (benda)
   Sumber artefak yang digunakan yaitu sumber data yang diperoleh melalui hasil pengamatan secara langsung terhadap tempat-tempat sejarah yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya makam keluarga Turaako dan makam keluarga Bokori yang merupakan kepala distrik pertama pada masanya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo (2013: 69-82) bahwa ada lima tahap penelitian sejarah yaitu : 1) Pemilihan Topik, 2) Heuristik, 3) Verifikasi, 4) Interpretasi dan 5) Historiografi. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo tentang metode penelitian sejarah maka dapat diuraikan tahapan-tahapan prosedur penelitian sebagai berikut: Untuk pemilihan topik penulis lebih memilih topik yang berkaitan dengan penelitian sejarah dan pemilihan topik berdasarkan pertimbangan dua hal yaitu: kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.

Tahap berikutnya yakni heuristik sumber. Heuristik sumber merupakan tahapan awal dalam melakukan kegiatan mencari, menemukan, mendapatkan dan mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data atau sumber terdiri atas studi dokumen, studi kepustakaan, studi lisan, dan studi artefak.

Tahap selanjutnya adalah verifikasi sumber. Untuk mengetahui autentisitas (keaslian) dan kredibilitas (kebenaran) data yang telah terkumpul tersebut maka penulis melakukan analisis kritik sejarah baik kritik eksternal maupun kritik internal. Setelah verifikasi, maka selanjutnya dilakukan interpretasi sumber. Setelah data melewati tahapan verifikasi dengan proses kritik eksternal dan kritik internal yang menghasilkan data autentisitas dan kredibilitas, selanjutnya data yang satu dihubungkan dengan data yang lainnya agar mendapatkan fakta sejarah. Tahap selanjutnya yakni historiografi atau penulisan yang merupakan rangkaian akhir dari penyusunan penelitian sejarah.

3. PEMBAHASAN

3.1 Latar Belakang Terbentuknya Distrik Pondidaha 1939-1964

3.1.1 Awal Mula Dibentuknya Distrik Pondidaha1939-1964

Kehidupan masyarakat kuno etnik Tolaki telah mengalami perkembangan dan perubahan. Awalnya masyarakat etnik Tolaki di Konawe memiliki pola kehidupan yang berkelompok dalam jumlah yang terbatas. Secara lambat laun pemerintahan mereka mengalami perkembangan dan membentuk sebuah *klen* dalam bentuk *o'napo* yang hidup di wilayah *anggalo* atau lembah. Kelompok masyarakat ini dipimpin oleh seorang *to'ono motuo* yaitu orang yang dituakan, seorang pemimpin yang dipercaya dapat melindungi kelompoknya. Tatanan sosial dan politik perlahan

terbentuk dalam unit-unit kesatuan tempat tinggal atau lingkungan sosial yang disebut *o'napo.* Pemimpin yang disebut *To'ono motuo* dibantu oleh beberapa perangkat dalam rangka membina tatanan kehidupan bermasyarakat (Melamba, 2013: 83).

Bermula dari pemukiman *anggalo* atau lembah, kemudian *o'napo* berkembang dengan bentuk pemukiman yang lebih luas seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yaitu pemukiman yang disebut *tobu* yang dikepalai oleh *pu'utobu*. Dengan terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat *(napo)* tersebut, maka timbullah suatu persaingan antara kelompok satu dengan kelompok lain sehingga terjadi peperangan antarkelompok. Peperangan ini disebabkan oleh kepentingan perluasan wilayah kekuasaan (hegemoni), status sosial, kebutuhan sumber daya manusia dan kepercayaan. Berdasarkan oral tradition atau tradisi lisan, masyarakat Tolaki telah ada jauh sebelum Kerajaan Konawe terbentuk. Di wilayah ini telah berdiri beberapa kerajaan kecil yang kemudian berintegrasi menjadi satu konfederasi yaitu Kerajaan Konawe. (Melamba, 2016: 254-255).

Awalnya penduduk hanya bermukim di wilayah yang dianggap aman dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat itu masyarakat belum mengenal sistem bermukim di kampung (mekambo). Namun Belanda datang dan masuk di wilayah ini, lalu mulai membentuk beberapa rumah-rumah kecil untuk tempat tinggal. Belanda juga menempatkan beberapa rumah masyarakat di jalan raya yang telah mereka bentuk dengan jarak yang tidak terlalu jauh antara rumah satu dan rumah lainnya.

Distrik Pondidaha terbentuk akibat dari takluknya Konawe oleh pihak Belanda pada tahun 1911. Pejuang-pejuang Konawe pada saat itu ditangkap dan diasingkan ke wilayah yang berbeda-beda. Salah satu tokoh perlawanan Konawe yang diasingkan ke Makassar adalah Watukila. Ponggawa Watukila yang awalnya memiliki pengaruh besar dan juga disegani oleh banyak orang dengan tegas menyatakan sikap berperang melawan Belanda. Pernyataan Watukila mendapat dukungan penuh dari seluruh kawasan Konawe. Kemudian Watukila dan para laskar Konawe mengadakan pertemuan dan mengatur rencana untuk menyerang Belanda. Setelah konsolidasi, pasukan Treves (Belanda) mulai membuka serangan baru terhadap laskar Konawe yang mengakibatkan pasukan Konawe mundur. Hampir seluruh pelosok Kerajaan Konawe dikuasai Belanda karena tidak adanya perlawanan yang terjadi selain perlawanan dari Watukila. Pihak Belanda mencoba mengirim utusan kepada Watukila untuk berdamai, namun Watukila menolak sehingga Watukila diasingkan dan dipenjara di Makassar bersama laskar Konawe lainnya (Tamburaka, 2004: 273-275).

Belanda yang berhasil menguasai Konawe kemudian membentuk kerajaan boneka yang dikenal dengan Kerajaan La Iwoi. La Iwoi merupakan daerah pemerintahan sendiri (daerah otonom) yang wilayahnya meliputi seluruh daerah *Onderafdeling* Kendari. Kerajaan La Iwoi muncul pada abad ke-19 dengan diangkatnya *Sapati* Ranomeeto Tabeu sebagai *Mokole.* Sebelumnya Ranomeeto merupakan salah satu wilayah *Barata* dari Kerajaan Konawe dengan kepala pemerintahannya adalah *Sapati.* Raja (Mokole) Konawe meninggal menjelang akhir abad ke-18. Sejak itu Dewan Kerajaan Konawe (dewan sara) tidak berhasil lagi mengangkat seorang *Mokole* atau raja. Namun demikian dalam hal-hal penting yang berkaitan dengan adat istiadat masih terasa kesatuan kerajaan (bekas) Konawe di bawah kepemimpinan Sulemandara (semacam perdana menteri). Setelah beberapa lama Tebau menjabat sebagai *Sapati* Ranomeeto, maka atas persetujuan dari Sulemandara ia ditetapkan sebagai *Mokole* (raja) Ranomeeto. Di bawah Mokole Laiwoi ditetapkan pejabat-pejabat: Sapati, Kapita, dan Punggawa.

Tebau juga dalam berita Belanda disebut sebagai Lakino Konawe. Kemudian dari Ranomeeto dikenal sebagai Kerajaan Laiwui yang dianggap (oleh Hindia Belanda) meliputi bekas Kerajaan Konawe. A.Ligvoet menyebut Maho sebagai Verstin van Laiwui. Maho adalah putra

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

pengganti Tebau. Pengganti Maho adalah putranya dari perkawinannya dengan Lasambawa anak dari *Aru Bakung* yaitu *La Mangu.*

La Mangu disebut sebagai Raja van Kendari yang pertama kali membuat perjanjian dengan Belanda pada 13 April 1858. Penggantinya yaitu Sao-Sao yang dalam dokumen resmi Belanda disebut sebagai Raja Van Laiwui. Jabatan-jabatan dalam Kerajaan Laiwui merupakan jabatan warisan. Mulai dari jabatan raja dan dewan kerajaan (sapati).

Sapati, Kapita dan Ponggawa, sampai kepada jabatan-jabatan kepala wilayah bawahan juga merupakan jabatan warisan. Wilayah bawahan ada 2 macam yaitu wilayah yang disebut *Tobu* yang dikepalai oleh *Pu'utobu* dan wilayah yang dikepalai oleh *To'ono motuo.* Tobu biasanya adalah wilayah yang daerahnya lebih besar dan dikepalai oleh keturunan bangsawan atau anakia, sedangkan wilayah lainnya lebih kecil dan dikepalai oleh golongan yang bukan bangsawan disebut golongan *To'ono motuo.* Kedua jenis wilayah bawahan ini merupakan daerah-daerah otonom yang mempunyai kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Dalam sejarah Laiwui semua pejabat tinggi kerajaan (Dewan Kerajaan) yaitu Sapati, Kapita dan Punggawa juga merupakan kepala-kepala dari wilayah bawahan tertentu.

Wilayah bawahan Laiwui dibagi atas distrik, dan distrik terbagi dari kampung-kampung. Kepala distrik diangkat oleh raja Laiwui atas persetujuan pemerintahan Belanda, sedangkan kepala kampung dipilih oleh rakyatnya. Pada awal pemerintahan Hindia Belanda, Kerajaan Laiwui dibagi atas 16 distrik yang masing-masingnya dikepalai oleh seorang kepala distrik yaitu:

1. Sampara
2. Abeli
3. Kolono
4. Konda
5. *Zuidelijk Boegineesehe Kustkampongs*
6. Palangga
7. Andoolo
8. Lambuya
9. Wawotobi
10. Pondidaha
11. Tongauna
12. Abuki
13. Latoma
14. Lasolo
15. Asera dan Wiwirano
16. Wawonii (Melamba, 2006: 308-313).

Tahun 1917 pembagian ini menjadi 17 distrik yaitu dengan dipisahkannya Uwepayu dari Distrik Lambuya menjadi distrik tersendiri. Kemudian pada perkembangannya pengangkatan pejabat distrik di samping aspek genealogis juga mempertimbangkan masalah pendidikan. Pejabat distrik minimal memiliki pendidikan dasar Volkschool dan mampu menulis dan berbahasa Belanda.

Belanda kemudian dengan mudah menguasai seluruh wilayah Konawe dan hasil-hasil bumi. Belanda yang berhasil menguasai hasil-hasil bumi kemudian membentuk distrik dan onderdistrik di seluruh wilayah Konawe, salah satunya adalah Distrik Pondidaha. Distrik Pondidaha awalnya adalah wilayah Onderdistrik yang tergabung di wilayah Distrik Wawotobi. Wilayah tersebut kemudian dimekarkan pada tahun 1939 dan menjadi sebuah pemerintahan onderdistrik yang berkembang menjadi Distrik Pondidaha. Kepala Distrik yang pertama adalah Tanggapili (Ajemain, wawancara pada 21 Agustus 2020).

Belanda memperalat raja-raja setempat dan melakukan pembagian wilayah bawahan ke dalam struktur baru yang tidak dikenal sebelumnya. Belanda kemudian berhasil merombak sistem masyarakat tradisional walaupun mendapat tantangan-tantangan sporadis yang dengan mudah dipadamkan.

Kehadiran Belanda secara langsung dalam pemerintahan membuat kedudukan elit tradisional merasa terancam. Banyak di antaranya yang menentang terlebih setelah pembentukan distrik-distrik dan diadakannya pajak yang dianggap amat menekan kehidupan rakyat. Tekanan tersebut ditambah lagi dengan adanya sistem pendidikan dan kedatangan para pegawai dari luar yang menembus batas-batas sistem masyarakat tradisional (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979: 122).

Perubahan distrik menjadi kecamatan berlangsung sampai keluarnya Perpu Nomor : 2 Junto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Realisasi Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya dengan SK Gubernur Provinsi Sulseltra tanggal 19 Desember 1964 nomor : 2067 A, maka daerah Kabupaten Kendari membentuk masing-masing kecamatan di setiap wilayah, termasuk di Konawe salah satunya adalah Kecamatan Pondidaha. (Sambari, 2020 : 23).

3.1.2 Pemerintahan pada Masa Distrik di Pondidaha

Pada sistem kepemimpinan di kerajaan tradisional, seorang *Mokole* atau raja sebelum memangku jabatan menjalani sumpah *Tinotonao* atau *Pinorehu* oleh seorang *To'onomotuo. To'onomotuo* dalam fungsinya mewakili seluruh rakyat di hadapan sidang pelantikan. Pelatikan dihadiri oleh segenap aparatur kerajaan seperti *Siwole Mbatohu, Pitudula Batuno Konawe, Tolu Mbulo anakia mbuutobu,* dan *Toluetu Lausa* (Melamba, 2013 : 136).

Di awal perkembangannya mereka membentuk sebuah perkampungan di sekitar perladangan, pertanian, maupun perburuan dengan model *metobu-tobu* (berkumpul) dalam satu lingkungan keluarga. Model pemukiman *metobu-tobu* adalah sistem pemukiman tradisional masyarakat di wilayah Pondidaha yang mana masih diatur secara adat, sedangkan pola pemukiman terpencar-pencar di daerah-daerah pedalaman, tepatnya di sekitar kompleks perladangan, perburuan maupun peternakan. Jarak rumah yang satu dengan rumah yang lain tidak begitu jauh supaya mereka dapat saling berinteraksi dengan mudah (Hartawan Konggoasa, wawancara pada 1 Juli 2020).

Setiap wilayah pemukiman terdiri dari beberapa kelompok keluarga inti yang masih terikat dalam satu lingkungan keluarga. Setiap wilayah pemukiman dipimpin oleh seorang t*o'onomotuo* yang ditunjuk oleh *Pu'utobu* dari kalangan penduduk asli. Jabatan *Pu'utobu* merupakan suatu jabatan yang mengepalai suatu wilayah yang terdiri dari beberapa desa. Kini istilah *Pu'utobu* dikenal dengan nama camat yang mana bertugas mengepalai dan memimpin suatu wilayah kecamatan. Dalam pemilihan pemimpin, masyarakat masih menggunakan sistem turun temurun dan dilihat berdasarkan usianya. Setelah masyarakat menemukan orang yang dituakan dan merupakan keturunan dari pemimpin sebelumnya maka ditetapkanlah sebagai *Pu'utobu* yang dipercaya mampu melindungi dan mengayomi masyarakat.

Seorang *To'onomotuo* juga ditunjuk karena didasari faktor usia serta berwibawa dan dianggap masih keturunan orang pertama kali (pemimpin sebelumnya) yang membawa kelompok-kelompok masyarakat di daerah tersebut. Setiap lingkungan terdapat orang-orang yang pandai (ahli) di bidang tertentu seperti, (1) pembinaan masyarakat : *Pabitara* diartikan sebagai orang yang cerdas atau pandai bermain silat lidah, *pabitara* ini juga berfungsi sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara perdata dalam desanya maupun keluar desanya untuk mewakilinya; *Posudo* (tiang penyangga), yaitu seorang yang disiapkan untuk membantu *tolea* dalam melaksanakan tugasnya. Tugas *Posudo* ini adalah pembantu umum apabila sewaktu-waktu diperlukan bantuannya; *Tolea* (utusan), jabatan *Tolea* ini bertugas khusus membantu *To'onomotuo* dalam urusan perkawinan dan

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

Tolea juga mempunyai tugas untuk menyampaikan berita-berita kematian, kelahiran dan pesta-pesta dengan membawa *Osara* yang disebut *O'kalo*, (2) urusan kesejahteraan: *Mbusehe* (tokoh perdamaian) fungsinya yaitu sebagai pelaksana upacara adat Tolaki untuk saling memaafkan segala kesalahan yang melukai hati masing-masing agar dihapuskan jika terjadi perselisihan, *Mbuo'wai* (pakar penyakit) mempunyai tugas khusus mengobati penyakit yang diderita oleh warga, (3) urusan keamanan: *Tamalaki* (panglima perang/laki-laki pemberani), berfungsi untuk melindungi warganya, jasa mereka sangat diperlukan untuk memenuhi pemintaan masyarakat setempat. Perubahan-perubahan mendadak kemudian terjadi setelah pemerintahan Hindia Belanda menguasai kekuatan politik dan ekonomi daratan Pondidaha (Banowu, 2014: 42).

3.2 Perkembangan Pemerintahan di Pondidaha

3.2.1 Zaman Belanda

Struktur pemerintahan di daerah Pondidaha telah ada sebelum Belanda datang menjajah. Struktur pemerintahan dan kedudukan kekuasaan pejabat-pejabat tradisional dilakukan secara turun temurun. Penentuan pejabat bawahan dari raja (*Mokole*) juga diambil dari pihak-pihak kerabat keluarga raja sehingga membentuk sistem pewarisan elite masing-masing daerah.

Kedatangan Belanda kemudian mengubah sistem pewarisan tersebut. Penentuan pejabat bawahan ini tidak lagi dimonopoli oleh kaum bangsawan melainkan siapa saja yang dianggap berpendidikan dan bisa berbahasa Belanda. Kedatangan bangsa Belanda ini menerapkan sistem pemerintahan yang sangat mengguncang sendi-sendi kehidupan masyarakat tradisional yaitu terjadinya proses transformasi sosial yang sangat cepat (Ginal Sambari, Wawancara pada 8 Juli 2020).

Dengan dijalankannya sistem pemerintahan distrik dan onderdistrik yang merupakan daerah bawahan dari pemerintah Belanda maka secara langsung terjadi perubahan terhadap struktur tradisional kerajaan. Sistem dari masing-masing tiap wilayah bawahan dihapuskan, diganti dengan pejabat-pejabat yang telah ditunjuk oleh pemerintah Belanda setempat. Setiap daerah *onderafdelling* terbagi menjadi daerah distrik yang dipimpin oleh kepala distrik. Keadaan pemerintahan wilayah Konawe saat itu diambil alih oleh Belanda adalah sebagai berikut.

1. Ranomeeto, di bawah Mokole, membawahi:
   - Sapati Ranomeeto
   - Ponggawa Poasia (Abeli) dipindahkan sebelumnya di Tongauna
   - Kapitan Bondoala (Sampara)
2. Konawe, tidak ada kepala terdiri dari:
   - Pondidaha (Pabitara atau Sulemandara)
   - Tongauna (Ponggawa)
   - Anggaberi (Hulubalang atau penghulu)
   - Abuki (Bokeo)
   - Lotoma (Sabandara)
   - Oepai (Kapitan Molepo atau Ana Molepo)
   - Lambuya Puriala (Inowa)
   - Wawotobi (Sulewatang)
3. Andoolo di bawah seorang anakia (Mokole)
4. Wiwirano di bawah seorang anakia
5. Lasolo dan Wawoni'I di bawah seorang anakia (Melamba, 2016: 254)

3.2.2 Zaman Jepang

Jepang mendarat di Kendari pada tanggal 24 Januari 1942. Pertempuran kemudian terjadi antara tentara Jepang dengan sisa-sisa tentara Belanda yang masih tertinggal. Jepang akhirnya

menang dan berhasil mengambil alih wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Setelah penyerahan kekuasaan tanggal 8 Maret 1942 dari pemerintah Hindia Belanda ke tangan Jepang maka Indonesia memasuki periode baru yaitu periode pendudukan militer Jepang. Pemerintah Jepang memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan sipil daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Daerah Siju sama dengan Keresidenan dahulu yang terbagi atas *siju* dan *ken*. Daerah *siju* sama dengan daerah *stadsgemente* dahulu (diistilahkan sekarang kota praja), daerah Ken sama dengan kabupaten, daerah Gun sama dengan kewedanan atau distrik, daerah *son* sama dengan kecamatan, sedangkan *hu* sama dengan kelurahan atau desa. Selaku kepala daerah pada *siju, ken, gun* dan *son* masing-masing diangkat seorang *syuco, kence, gunco, sonco*, dan *kuco* (Notosusanto, 1984: 10).

Masa pendudukan Jepang menimbulkan banyak kerugian di wilayah kerajaan Laiwui tepatnya daerah Konawe. Pada masa pemerintahannya, Jepang menindas dan memperlakukan penduduk dengan semena-mena. Semua aturan hukum dan aturan bermasyarakat dilanggar. Di masa penjajahan Jepang, kehidupan masyarakat mengalami perubahan drastis hampir di semua aspek kehidupan. Para pemimpin daerah dipecat dan hal ini tampak jelas terjadi di Ranomeeto. Lumpuhnya pemerintahan lokal di daerah-daerah tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pemulihan kembali (Melamba, 2013: 368).

Kedatangan tentara Jepang awalnya diterima sebagai suatu proses sosialisasi yang menguntungkan rakyat banyak (rakyat biasa). Tetapi lambat laun proses tersebut telah mengakibatkan lenyapnya wibawa golongan atas yang selama ini bertindak sebagai pemimpin masyarakat. Para pemimpin bersama masyarakat awalnya menerima baik kedatangan Jepang karena bujuk rayu dan semboyan-semboyan yang berhasil mengelabui kesadaran masyarakat setempat, namun semuanya berubah menjadi gelisah dan benci ketika Jepang berkuasa di semua bidang. Seketika semboyan "Nippon-Indonesia sama-sama" lenyap begitu saja, sebaliknya justru timbul kekejaman, kekerasan, dan kekejian (Melamba, 2013: 371).

Jepang dengan cepat menguasai seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Pada masa itu kerja wajib atau kerja paksa merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh kaum lelaki tanpa balas jasa ataupun jaminan hidup dari pemerintah Jepang. Jika ada kaum laki-laki yang tidak mau bekerja dan bermalas-malasan akan dicurigai sebagai mata-mata dan akan dibunuh secara kejam.

Pengumuman kekalahan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 kemudian dilanjutkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun 1945 masih banyak tentara Jepang yang berada di wilayah Konawe. Saat para tantara Jepang mendengar kabar bahwa negara mereka telah diluluhlantahkan oleh bom atom Amerika, banyak dari mereka yang melakukan bunuh diri.

3.2.3 Kondisi Awal Kemerdekaan di Pondidaha

Takluknya Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 yang kemudian disusul dengan Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 secara hukum menyatakan Negara Kesatuan RI yang telah resmi berdiri. Berita proklamasi segera disampaikan kepada seluruh masyarakat Pondidaha yang ada di pedalaman secara lisan sebab pada saat itu tidak ada alat komunikasi berupa telepon atau radio. Untuk mengirim berita yang menggembirakan itu tentu saja memakan waktu yang cukup lama. Setelah seluruh masyarakat mengetahui kabar tersebut mereka segera mengibarkan bendera merah putih. Pengibaran bendera merah putih di Pondidaha adalah sebagai tanda bahwa Pondidaha adalah wilayah republik (Banowu, 2014 : 57).

Setelah peperangan selesai maka mulai dilakukan penataan kembali struktur pemerintahan di daerah Konawe. Pada awalnya hal ini membutuhkan waktu yang sangat lama oleh karena secara umum para kepala daerah baru saja mengalami guncangan moral yang besar. Namun, pada akhirnya

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

dilakukan pengisian kembali pejabat-pejabat pemerintah secara otonom walaupun kedudukan tersebut kurang cocok bagi penerima jabatan tersebut.

Para pemimpin dan rakyat daerah baru yang mengalami guncangan moral yang besar tetap berusaha agar wilayah mereka dapat terkendali lagi dan penataan jabatan-jabatanya dapat tersusun dengan baik. Terdapat beberapa pengisian jabatan yang tidak sesuai dengan bidangnya namun mereka akan memperbaiki setelah keadaan benar-benar sudah stabil dan aman.

Pada saat itu di daerah Sulawesi Tenggara terdapat 2 kerajaan (Swapraja) yaitu Buton dan Laiwoi (Kendari) ibu kota *Afdeeling*. Swapraja Laiwoi diperintah oleh dewan yang terdiri dari:

- Raja (Sangia) : *Mokole* Tekaka
- *Sapati* : *Sapati Mali*
- *Kapitan* *: Kapita* Lasandara.

3.3 Kebijakan-Kebijakan yang Diterapkan oleh Kepala Distrik Pondidaha

3.3.1 Tanggapili: 1939-1944

Tanggapili menjabat sebagai kepala distrik di Pondidaha dari tahun 1939 dan masa jabatan berakhir pada tahun 1944. Selama masa pemerintahan Tanggapili, wilayah Pondidaha mengalami kemajuan yang membuat masyarakat yakin bahwa Tanggapili merupakan seorang pemimpin yang mampu memajukan wilayahnya. Tanggapili dipilih sebagai kepala distrik karena masih memiliki keturunan bangsawan dan juga memiliki ketegasan sehingga pemerintah dan pihak Belanda memilihnya untuk menjadi pemimpin di Pondidaha. Namun, karena ada beberapa faktor sehingga beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya (Gunawan Saranani, Wawancara pada 11 Desember 2020).

3.3.2 Turaako : 1944-1954

Masyarkat sepakat untuk mengadakan pemilihan kepala Distrik Pondidaha pada saat Tanggapili mengundurkan diri. Berdasarkan hasil pemilihan, Turaako terpilih menjadi Kepala Distrik Pondidaha yang kedua. Selama masa jabatan berlangsung Turaako disegani oleh masyarakat Pondidaha karena beliau pemimpin yang berwibawa dan ramah terhadap masyarakatnya. Selama masa kepemimpinannya Turaako menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

a. Membagi wilayah distrik menjadi ;
   - Wukusao,Wawoone,Wawonggole, Pudai dan Lamokuni. Wilayah ini dikepalai oleh ketua gabungan Wawoone yang pegang oleh Sambari.
   - Hongoa, Amesiu, Lahunggumbi dan Wawolemo. Wilayah ini dikepalai oleh ketua gabungan Lahunggumbi yang dipegang oleh Deruse.
   - Dunggua, Benua, Woerahi dan Anahinunu. Wilayah ini dikepalai oleh kepala gabungan Benua yang dipegang oleh La Anda (Ginal Sambari, wawancara pada 27 November 2020).

3.3.3 Labulua : 1954-1955

Jabatan Labulua tidak melalui pemilihan dari masyarakat. Masa pemerintahan Labulua hanya bertahan hingga satu tahun dan beliau hanya menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpin sebelumnya. Sebelum ia sempat mengadakan perubahan wilayah, masyarakat sudah meminta untuk diadakan kembali pemilihan kepala distrik. Munculnya permintaan itu disebabkan karena Labulua dianggap kurang tegas dalam mengambil suatu keputusan (Ginal Sambari, wawancara pada 27 November 2020).

3.3.4 Bokori : 1955-1964

Seiring berjalannya waktu Pondidaha membutuhkan seorang pemimpin yang tegas. Saat diadakan pemilihan, Bokori terpilih menjadi kepala distrik. Beliau tetap menjalankan kebijakan yang telah ada karena menurut Bokori kebijakan itu dapat mempermudah proses pemerintahannya.

Pemimpin dan masyarakat Pondidaha pada saat itu masih memiliki ikatan keluarga sehingga mereka menyelesaikan permasalahan dengan cara bermusyawarah dan secara kekeluargaan. Selain itu mereka sangat mengedepankan adat-istiadat yang telah diajarkan oleh para leluhur mereka. Bokori dipilih karena masih keturunan bangsawan di Konawe, berikut silsilah dari Bokori.

4. SIMPULAN

Dari seluruh pembahasan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Onderdistrik Pondidaha terbentuk akibat ditaklukkannya Konawe oleh Belanda pada tahun 1911 sehingga kondisi pemerintahan di Konawe diambil alih oleh Belanda. Belanda kemudian membentuk sebuah kerajaan boneka yang bernama La Iwoi. Belanda juga membagi wilayah serta membentuk distrik dan onderdistrik. Pada tahun 1939 terbentuklah Onderdistrik Pondidaha yang merupakan bagian dari wilayah Distrik Wawotobi.
2. Pada perkembangan pemerintahan Pondidaha terdapat tiga zaman atau masa yakni zaman Belanda, zaman Jepang dan awal kemerdekaan.
3. Selama menjabat sebagai Kepala Distrik Pondidaha, Turaako, Labulua, dan Bokori memiliki kebijakan-kebijakan yang diterapkan dI wilayahnya di antaranya yakni pembagian wilayah untuk daerah Pondidaha.

DAFTAR PUSTAKA

Akmal, Andi. 2016. *Sejarah Perkembangan Kecamatan Sampara.* Acta Djurnal, Volume I. No.2.

Aswati. 2011. *Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Kerajaan Konawe.* Selami IPS, Volume I. No. 34.

Banowu, Rolan. 2014. *Perkembangan Sistem Pemerintahan di Wawatobi dari Distrik hingga Kecamatan 1906-1959*. Skripsi. FKIP Unhalu: Tidak diterbitkan.

Bawanda, Wiliam. 1996. *Peran Kepala Distrik dalam Meningkatkan Perekonomian.* Djurnal, Volume I. No.2.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1979. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara.* Jakarta : Balai Pustaka.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 1987. *Dokumen DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.* Kendari.

Husein A. Chalik,dkk.1985/1989. *Sejarah Daerah Sulawesi Tenggara.* Dekdikbud Jakarta.

Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

——— 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kartodirdjo, Sartono, 2019. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*.Yogakarta: Ombak.

Lumintang. 2015. *Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat di Desa Tara-Tara* I. Acta Djurnal, Volume IV. No.2.

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

Melamba, Basrin, dkk. 2016. *Sejarah dan Budaya Masyarakat Tolaki di Konawe*. Yogyakarta: Lukita.

_____ 2013. *Tolaki Sejarah, Identitas dan Kebudayaan.* Yogyakarta: Lukita.

_____2011. *Sejarah Tolaki di Konawe.* Yogyakarta: Teras.

Notosusanto, Nugroho, 1984. *Sejarah Nasional Indonesia IV.* Jakarta: Dekdikbud.

_____1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer.* Jakarta: Yayan Indayu.

Rustam E. Tamburaka, 2004, *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 Tahun Sultra Membangun.* Jakarta: PT Inco Tbk.

Sambari, Ginal. 2020, *60 Tahun Konawe.* Konawe: Tidak diterbitkan

Susanto.S, Astrid. 1983. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial.* Yogyakarta: Binacipta.

Soekanto, Soerjono. 1997. *Teori Sosial tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Surianingrat, Bayu. 1922. *Mengenal Ilmu pemerintahan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Tarimana, Abdurrauf. 1989. *Kebudayaan Tolaki.* Jakarta : Balai Pustaka.

Yunita, Nur Khumalah. 2013. *Perubahan Sosial dari Masyarakat Rural ke Masyarakat Urban.* Skripsi, Surabaya: Jurusan Sosiologi FDIK IAIN.